



POLITIC (Hal.3)
**Kritisi Pemberian
RUU PPRT,
Wakil Ketua MPR-
Segera Tuntaskan**

6 Nelayan di Merak Tewas Misterius, Dipicu Virus?

Sebanyak 6 orang nelayan ditemukan tewas di kapal penangkap ikan tuna di perairan Merak, yakni Kapal Motor (KM) Sri Mariana pada Minggu (4/8/2024) dini hari. Sementara 9 nelayan sakit. Bahkan satu diantaranya dalam kondisi kritis. Hingga kini penyebabnya masih misterius. Jenazah sudah dievakuasi ke RS Drajad Prawiranegara Serang oleh petugas dengan alat pelindung diri (APD). Tim Kemenkes juga turun tangan langsung ke lapangan. Muncul isu dipicu oleh virus baru. Benarkah?

Berita lengkap Hal.2

(Foto: Polda Banten)

ISTRI CAK IMIN TERSERET 'BOLA SALJU' KONFLIK PKB-PBNU

Rustini Dituding Pakai Dana Timwas Haji, Banser Siaga 24 Jam

Bak efek 'bola salju'--dimulai dari hal kecil menjadi hal yang terus membesar-- konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) makin melebar. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dilaporkan oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Alasannya, Cak Imin membawa istri saat bertugas sebagai Ketua Timwas Haji 2024. Di sisi lain, Lukman Edy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh PKB setelah memberikan keterangan kepada Tim Panel PBNU. Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid tak hadir undangan PBNU. Dia menilai sang ketua, Yahya Cholil Staquf seolah mengadu domba warga nahdliyin. Di sisi lain, tim panel Pansus PKB saat ini sedang menjadwalkan silaturahmi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca di hal 11....

PENDIRI DAN SEJARAH AWAL PARTAI PKB

- PKB didirikan pada 23 Juli 1998 oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk berpartisipasi dalam politik Indonesia setelah era Reformasi.
- PKB bertujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam moderat, keadilan sos dan menjaga keberagaman serta kebhinekaan bangsa Indonesia.
- Pembentukan PKB melibatkan Tim Lima dan Tim Asistensi yang menyusun rencana da pada Juni 1998, termasuk visi, misi, dan struktur partai.
- KH Abdurrahman Wahid (G Dur) berperan penting dalam pendirian PKB, meski awalnya khawatir tentang hubungan antara politik dan agama.
- Baru-baru ini, PKB kembali menjadi sorotan karena rencana PBNU membentuk pansus untuk mempertimbangkan pengembalian PKB ke pangkuan NU.



Misteri Tewasnya Nelayan di
KM Sri Mariana Merak

KEMENKES TURUN TANGAN, ISOLASI 9 ORANG YANG SAKIT

Petugas mengevakuasi jenazah enam nelayan yang ditemukan tewas secara misterius di atas KM Sri Mariana di Pulau Tempurung, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon pada Minggu (4/8/2024). Foto: Polda Banten

BANTEN - Terjadi sebuah peristiwa mengejutkan dan misterius di kapal penangkap ikan tuna di perairan Merak. Sebanyak 6 orang di Kapal Motor (KM) Sri Mariana tewas dan 9 lainnya sakit. 1 di antara yang sakit ini bahkan kondisinya kritis.

Belum diketahui apa penyebabnya. 9 nelayan sakit itu dirawat di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon. Pemeriksaan ditangani langsung oleh tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sehingga para pasien ditempatkan secara terpisah.

"Iya dirawat di kami, sekarang masih di IGD, ditempatkan terpisah karena sedang dalam penanganan tim dari Kemenkes," kata Humas RSKM, Agus, Senin (5/8/2024).

Agus masih enggan berbicara banyak mengenai kondisi para nelayan tersebut karena masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Kemenkes.

"Nanti lengkapnya tunggu dari Kemenkes aja, tunggu hasilnya, karena yang menangani kan dari Kemenkes," ujarnya.

Diketahui, etugas bermasker dan bahkan berhazmat mengevakuasi jenazah 6 nelayan yang ditemukan tewas secara misterius di KM Sri Mariana, Minggu (4/8/2024) dini hari.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Heriyanto mengatakan, pihaknya belum mengetahui penyebab yang membuat 6 nelayan tewas dan 9 nelayan lainnya sakit.

Sebab, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil autopsi dari 6 jenazah yang dilakukan oleh tim

forensik dari Rumah Sakit Drajad Prawiranegara terhadap para korban.

"Kita belum tahu karena apa, nggak tahu karena penyakit atau karena apa, kita belum tahu. Nanti tunggu hasil autopsi, masih nunggu keluarganya karena autopsi itu harus ada keluarganya dulu," katanya.

"Belum tahu (kapal) dari mana mau ke mana, yang yidiknya juga takut tertular, pas evakuasi pun pakai APD (alat pelindung diri—hazmat) lengkap. Mohon bersabar ya," sambungnya.

Sementara itu, Dirpolairud Polda Banten, Kombes Pol Yunus Hadith Pranoto, mengatakan peristiwa ini diketahui usai salah satu kru di KM Sri Mariana melaporkan melalui radio satelit.

"Pada pukul 00.30 WIB, ada laporan ke tim Patroli Ditpolairud Polda Banten, bahwa di atas kapal KM Sri Mariana ada 6 mayat dan 1 orang kritis," kata Yunus, Senin (5/8/2024).

Kru KM Sri Mariana pun diminta mendekati kapalnya ke Pulau Tempurung agar bisa ditambatkan ke KMB Pelangi yang tengah patroli.

Pulau Tempurung ini berada di wilayah Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

Petugas lalu mengevakuasi para nelayan. Petugas menggunakan APD saat memindahkan 6 mayat dan evakuasi 9 nelayan sakit.

WHO Bicara soal Mpx

Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tengah mengkaji kemungkinan menaikkan status wabah Mpx yang dulu dikenal 'cacar

monyet', menjadi darurat internasional.

Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memanggil sejumlah pakar termasuk dari badan kesehatan PBB dan Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit Afrika, tempat Mpx banyak menyebar.

"Seiring dengan menyebarnya jenis Mpx yang lebih mematikan ke banyak negara Afrika, WHO, CDC Afrika, pemerintah daerah, dan mitra semakin meningkatkan respons untuk menghentikan penularan penyakit," kata Tedros di platform media sosial X, dikutip Senin (5/7/2024).

"Namun, diperlukan lebih banyak pendanaan dan dukungan untuk respons yang komprehensif. Saya sedang mempertimbangkan untuk mengadakan komite darurat Peraturan Kesehatan Internasional dan memberitahu apakah wabah mpx harus dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional."

Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) merupakan peringatan tertinggi yang dapat dibunyikan WHO. Penetapan tersebut juga sebelumnya berlaku pada COVID-19.

Peraturan Kesehatan Internasional adalah kerangka kerja yang mengikat secara hukum untuk menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Mpx adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Ditularkan ke manusia oleh hewan yang terinfeksi, juga dapat ditularkan antarmanusia melalui kontak dekat fisik.

DATA KORBAN MENINGGAL

1. Abdul Mujani
2. Handayana alias Rohmat (tidak ada di crew list)
3. Agung (tidak ada dicrew list)
4. Irfan
5. Agung prasetyo
6. Irvan Septian alias Rifki

DATA NELAYAN SAKIT:

1. Rasmen
2. Slamet Puryanto
3. Anam Suryana
4. Winarto
5. Khaerul Ikhwan
6. Akmal Maulana
7. Dian Mulyadi
8. Dedi
9. Edi Zaenudin

Mpx pertama kali ditemukan pada manusia pada 1970 di Republik Demokratik Kongo.

Wabah mpx global dua tahun lalu menyebabkan WHO mengumumkan PHEIC, berlangsung dari Juli 2022 hingga Mei 2023. (tro,ist,tar/wid)

Kritisi Pembiaran RUU PPRT, Wakil Ketua MPR: Segera Tuntaskan

JAKARTA - Dalam 20 tahun terakhir berbagai organisasi masyarakat sipil mengajukan dan memperjuangkan RUU PPRT ke DPR. Selama dua dekade, RUU PPRT sudah mengalami berbagai proses kajian, studi banding, berbagai proses dialog, revisi dan pembahasan, hingga posisi terakhir sudah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada 21 Maret 2023. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa RUU itu akan dibahas dan disahkan.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta Pimpinan DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang untuk mewujudkan perlindungan yang menyeluruh bagi jutaan pekerja rumah tangga dari ancaman kekerasan.

"Pimpinan DPR RI harus menyegerakan proses legislasi untuk mengakselerasi pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya yang awal diterima di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dia menjelaskan, catatan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) terdapat 3.308 kasus kekerasan PRT sepanjang 2021 sampai dengan Februari 2024. Tenaga kerja di sektor pekerja rumah tangga Indonesia, menurutnya didominasi perempuan yakni 84 persen dari jumlah pekerja, dan 20 persennya dari PRT berusia di bawah 18 tahun.

Menurut Lestari sejumlah catatan tersebut cukup untuk menjadi landasan dalam mengakselerasi proses lahirnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tanpa perangkat perlindungan hukum yang memadai, menurutnya jutaan perempuan dan anak terancam menjadi objek kekerasan saat mencari nafkah.

Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menegaskan, Pimpinan DPR seharusnya segera mengambil langkah yang strategis untuk



Sejumlah pembantu rumah tangga (PRT) berdemo di depan gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, mendesak DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). (Ist)

memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi para PRT yang didominasi kaum perempuan itu.

Selain soal PRT, menurutnya perempuan memiliki peran penting dalam keluarga sebagai ibu sekaligus guru pertama bagi anak-anaknya dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti sejak dini.

Dengan tidak terlindunginya PRT, dia menilai jutaan keluarga Indonesia pun terancam tidak mampu memiliki ibu dan guru yang bisa menanamkan nilai-nilai budi pekerti bagi generasi penerus bangsa.

Untuk itu, dia mengaku sangat berharap DPR dapat segera memberi perlindungan yang menyeluruh kepada para PRT yang memiliki peran strategis dalam proses pembangunan bangsa.

DPR Berganti, Khawatir Dimulai dari Nol Lagi

Komite Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Komnas Perempuan khawatir RUU PPRT akan dimulai dari nol lagi saat anggota DPR berganti.

Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang, awalnya menjelaskan DPR telah menetapkan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR pada Maret 2023. Dia mengatakan Presiden juga telah mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PPRT ke pimpinan DPR dan menunjuk kementerian yang mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU PPRT bersama DPR.

"Ironisnya, lebih dari 20 tahun, RUU PPRT belum ada tanda-tanda untuk disahkan. Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan-undangan, jika tidak ada satu nomor DIM yang disepakati pada sisa waktu periode legislatif saat ini, maka RUU PPRT dikategorikan sebagai RUU non-carry over," kata Veryanto beberapa waktu lalu.

Very mengatakan Komnas Perempuan menerima sebanyak 25 laporan kasus dari PRT pada 2019-2023. Dia menyebut ada juga data dari KPAI yang menunjukkan anak bekerja sebagai PRT.

"Data catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang 2019-2023, setidaknya terdapat 25 kasus terkait PRT yang diajukan ke Komnas Perempuan.

Tahun 2020 dalam pengawasan, KPAI menemukan 30 persen anak dalam bentuk pekerjaan terburuk (BPTA) merupakan PRT anak," ungkap Very.

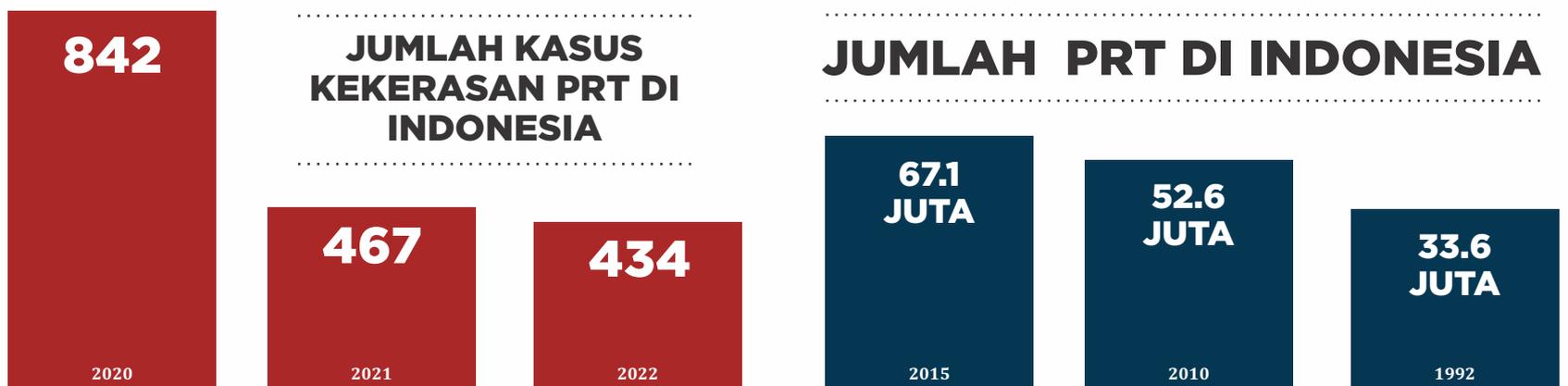
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Chadidjah Salampessy, kemudian menyampaikan kekhawatirannya jika RUU PPRT dikategorikan non-carry over. Dia mengatakan pembahasan RUU tersebut harus dibahas dan memang harus mulai dari nol untuk memperkenalkan lagi kenapa ini menjadi penting, bukan suatu perkara yang mudah 20 tahun perjalanan itu dan memulai dari nol," sebut Olivia.

Dia menilai ada juga kekhawatiran pemberi kerja akan timbulnya hukum pidana jika RUU PPRT ini disahkan. Dia menegaskan RUU PPRT fokus pada pemberian hak jaminan sosial dan pengakuan terhadap para PRT.

"Nah salah satu haknya yang kami minta dilindungi, ya jaminan sosialnya, paling kecil itu. Kalaupun itu tidak bisa diberikan, bahkan untuk jaminan mereka saja, BPJS-lah ya. Ini kan perbudakan modern yang nyata yang dilakukan oleh negara. Kita tidak bisa mengelak bahwa ini bukan perbudakan," ujar Olivia.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyoroti dampak yang muncul jika RUU PPRT tidak kunjung disahkan. Dia mengatakan DPR perlu mempertimbangkan persoalan RUU PPRT ini secara serius.

"Kalau ini tidak di sahkan tentu situasi PRT tetap dalam ancaman. Tetap mengalami kerentanan dari segala bentuk, seperti perdagangan orang, perbudakan modern, eksploitasi seksual dan lain-lain. Mestinya ini menjadi pertimbangan serius," ujar Anis. (tro,ist,rls/dya)



Internal Muhammadiyah Terbelah, Tolak Konsesi Izin Tambang Pemerintah

JAKARTA - Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Sejumlah pihak dari kalangan internal menolak sikap tersebut. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat. Bahkan Izin Pengelolaan Tambang (IUP) itu dinilai sarat kepentingan politik transaksional.

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran pengelolaan tambang. Pernyataan itu disampaikan sebelum PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mencabut aturan pemberian izin tersebut.

"Aturan ini bertentangan dengan regulasi di atasnya dan sarat dengan kepentingan politik transaksional," bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY, dikutip Senin (5/8/2024).

Selain itu, DPD IMM DIY juga menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif di Indonesia dan mendesak Muhammadiyah untuk turut serta dalam upaya pemulihan lingkungan hidup. Kala itu, perkumpulan mahasiswa Muhammadiyah di Yogyakarta ini merekomendasikan Muhammadiyah segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan.

"Yang jelas-jelas akan memperpanjang krisis sosial-ekologis dan berdampak buruk pada warga yang terkena dampak langsung dari tambang batu bara," kata mereka.

Masukan dari DPD IMM DIY ternyata tidak diindahkan oleh PP Muhammadiyah. Penolakan kemudian juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah setelah PP Muhammadiyah menyatakan akan menerima izin tambang.

Pegiat lingkungan Muhammadiyah Hening Purwati Parlan masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang. Pernyataan menolak itu akan disampaikan dalam Konsolidasi Nasional yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta pada 26-27 Juli 2024.

"Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidak menerima tambang untuk Muhammadiyah dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah," ucap Hening Parlan.

Koalisi masyarakat sipil, akademisi, aktivis dan mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat



Suasana unjuk rasa penolakan izin tambang di seberang Convention Hall Masjid Walidah Unisa Yogyakarta.ist

Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Dilansir dari rilis pers aksi, jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan tidak boleh terlibat dalam bisnis tambang. Pemberian izin bisnis tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke dalam lumpur dosa ekologis karena praktik bisnis tambang saat ini dilakukan dengan ugul-ugulan dan tidak berkelanjutan.

"Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kemungkinan tetap akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang bisa jadi lebih merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat mudah mengambil sikap, yakni bersama masyarakat menolak dan mengharamkan segala bentuk perusahaan," kata Sana Ullaili dari SP Kinasih.

AMM Trenggalek juga menolak keputusan PP Muhammadiyah yang menerima izin tambang. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat.

Menolak keras keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024," bunyi keterangan tertulis yang diterima Tempo, pada Ahad 4 Agustus 2024.

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, Arifin, dalam deklarasinya meminta PP Muhammadiyah untuk membatalkan keputusan penerimaan izin tambang tersebut.

"Meminta Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membatalkan keputusan penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut karena kegiatan tambang ekstraktif memiliki

banyak mudharat," kata Arifin.

Deklarasi penolakan itu terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Wathan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang tergabung dalam AMM Trenggalek.

NU Sebut Butuh Biaya

Sementara, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut akan segera menerima izin tambang batu bara dari pemerintah.

"Insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami sudah bisa menerima hasilnya. Tentu saja dengan berbagai macam norma-norma dan tata cara yang sudah ditetapkan," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dikutip dari kanal YouTube NU, Senin (5/8/2024).

Dalam penjelasannya, pengelolaan tambang menjadi salah satu bentuk konsolidasi sumber daya pembiayaan yang ingin dikembangkan NU. "Gampangnya ya soal duit karena organisasi butuh biaya," ucapnya.

Sikap NU yang menerima tawaran pengelolaan atau izin tambang ini merupakan keputusan bersama. Dia menyebut penawaran izin ini akan segera dikerjakan, dan sedang dalam proses perizinan. "Itu berdasarkan hasil rapat PBNU, jadi bukan keputusan saya sendiri," ucapnya.

Sebelumnya, Yahya memastikan NU akan segera menyiapkan struktur bisnis untuk dapat mengelola tambang batu bara. "Dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya," kata Gus Yahya dalam siaran pers 3 Juni 2024.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke ormas. Ia menilai pemberian izin tambang kepada PBNU adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kebijakan afirmasi tercapai. (tro,ant,rls/fya)

Lahan tambang yang akan diberikan:

-  PT Kaltim Prima Coal (KPC),
-  PT Arutmin Indonesia,
-  PT Kendilo Coal Indonesia,
-  PT Adaro Energy Tbk,
-  PT Multi Harapan Utama (MAU),
-  PT Kideco Jaya Agung.

Lahan itu dialokasikan kepada enam ormas agama:

- Nahdlatul Ulama (NU),
- Muhammadiyah,
- Kristen (Persatuan Gereja Indonesia),
- Katolik (Kantor Waligereja Indonesia),
- Hindu,
- Buddha.

Payung Hukum Ormas Agama Kelola Tambang

(PP Nomor 25 Tahun 2024)

DETIL PERATURAN

Aturan mengenai IUP itu tertuang dalam pasal 83A, yang kisi-kisinya sebagai berikut:

Ayat 1: Memberikan jatah izin tambang WIUPK pada ormas lewat badan usaha yang dimiliki oleh ormas tersebut. Wilayah yang dimaksud di sini adalah wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP2B.

Ayat 3: IUPK dan/atau kepemilikan saham badan usaha ormas yang mengelola WIUPK tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan menteri.

Ayat 4: Kepemilikan saham ormas keagamaan dan badan usaha ormas tersebut harus mayoritas dan menjadi saham pengendali.

Ayat 5: Badan usaha ormas tidak diperbolehkan bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya maupun organisasi apapun yang merupakan afiliasinya.

Peringatan Hari Jadi Blitar Ke-700 , Bupati Beber Kinerja dan Berikan Penghargaan

BLITAR - Pada Peringatan Hari Jadi Blitar Ke-700 pada 5 Agustus 2024, Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah membeberkan capaian kinerja selama 3 tahun memimpin Kabupaten Blitar. Serta memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi, untuk beberapa pihak.

Momentum 700 Tahun Blitar berdiri atau 7 abad tepatnya Kabupaten Blitar berdiri, dengan julukan Land Of Kings (Tanah para raja) terus berbenah diri. Perkembangan cukup luar biasa, baik itu disektor ekonomi, kesehatan maupun sektor lainnya.

Termasuk prestasi yang diraih juga sangat membanggakan. Namun demikian, Kabupaten Blitar harus terus berjuang demi mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia balatun toyyibatun warobun ghofur.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah dalam sambutan pada Acara Pisowanan Ageng di Pendopo Ronggo Hadinegoro (RHN), Senin(5/8/2024).

Bupati perempuan pertama di Blitar ini menyampaikan Kabupaten Blitar yang telah berdiri selama 7 abad ini, dimana 7 atau pitu (bahasa Jawa) bisa diartikan pitulungan yang menandakan Kabupaten Blitar selalu memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demi kejayaan dan kemakmuran, serta nasib baik masyarakat Kabupaten Blitar.

"Dan hasilnya, berkat ridho Allah SWT, ikhtiar, kerja keras dan dukungan seluruh elemen masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada Tahun 2023 telah mencapai 4,45 persen," ungkapnya.

Selain itu prestasi yang diraih juga luar biasa, tahun 2023 telah mendapatkan opini WTP 8 kali berturut-turut, penghargaan perencanaan kabupaten terbaik, dan penghargaan lainnya yang patut disyukuri dan pelecut semangat untuk meraih penghargaan lainnya dimasa



Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah pada Acara Pisowanan Ageng Hari Jadi Ke-700 Blitar di Pendopo Ronggo Hadi Negro, 5 Agustus 2024.

mendatang.

Selain itu dibeberkan Bupati Blitar pembangunan selama 3 tahun terakhir mulai tahun 2021-2024, total ruas jalan yang telah dilakukan pengerjaan sepanjang 294.601,56 meter, drainase sepanjang 112.964,06 meter, jembatan sebanyak 38 unit dan perbaikan URC sebanyak 288 titik. Sedangkan Program sertifikat tanah yang telah berjalan sampai saat ini sebanyak 150.698 sertifikat dan 4.566 sedang berproses.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional yang sedang berjalan, yaitu JLS sudah melampaui target berjalan sebanyak 62 persen.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Gedung 8 Lt RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Proses pembangunan fasilitas jalan Brongkos - Binangun.

"Untuk itu marilah kita selalu berdoa dan berusaha agar di tahun 2024 ini, segala rencana terutama program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan baik dan persentase tinggi," paparnya.

Lebih lanjut Bupati Blitar juga menyampaikan bahwa sesuai arahan pidato presiden, pada tahun 2024 pemerintah menetapkan target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blitar bersama seluruh elemen harus bersatu menurunkan angka stunting dan kemiskinan, dengan target zero stunting.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga memberikan penghargaan kepada anggota Forkopimda, Komandan Batalyon Infanteri 511/Dibiyatara Yudha, dan Pengadilan Negeri Blitar yang telah membantu, bekerjasama, menjalin sinergitas dan selalu berkolaborasi dalam membangun Kabupaten Blitar.

Selain itu penghargaan juga diberikan kepada BPBD Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan Kepla Basarnas Pos Trenggalek atas peran aktifnya dalam penanganan bencana di Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar juga menyampaikan penghargaan kepada BNN, karena aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kemudian

Muslimat dan Fatayat NU Kabupaten Blitar, atas peran aktifnya dalam penanganan stunting. FKUB juga mendapatkan penghargaan, karena peran aktif dalam membangun, memelihara, memberdayakan kerukunan, dan kesejahteraan umat di Kabupaten Blitar.

Dalam kesempatan tersebut, Mak Rini sapaan akrab Bupati Blitar juga memberikan penghargaan, kepada warga Kabupaten Blitar yang mempunyai prestasi dan berkontribusi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Blitar. Antara lain dibidang sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan seni budaya.

"Lewat penghargaan seperti ini, mudah-mudahan bisa memantik semangat yang lain agar bisa berkarya dan berkontribusi untuk Kabupaten Blitar tercinta ini," tegasnya.

Diakhir sambutannya Bupati Blitar menyerukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar, bahwa dengan semangat hurub hambangun praja, kompak mewujudkan Kabupaten Blitar yang maju dan sejahtera pungkasnya.

Nampak hadir dalam kegiatan Pisowanan Ageng tersebut antara lain anggota Forkopimda, perwakilan dari kabupaten/kota di Jawa Timur, para Bupati Blitar periode sebelumnya, yakni Herry Noegroho dan Rijanto. Para Sekretaris Daerah yang sudah purna, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat serta Kepala Desa dan Lurah beserta jajaran se Kabupaten Blitar.

Menutup kegiatan tersebut, sebagai bentuk syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Bupati Blitar potong tumpeng yang diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito dan Ketua Dekranasda Kabupaten Blitar, H Zaenal Arifin. Diakhiri dengan foto bersama dengan para pejabat tamu undangan.(Arief Sukaputra/*)

BNPB Sebut Status 3 Provinsi Siaga Darurat Kekeringan: **Jatim, Jateng dan DIY**

JAKARTA- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, sebanyak 51% zona musim (ZOM) di Indonesia masuk musim kemarau. Selain itu, kondisi hari tanpa hujan (HTH) kategori menengah masih akan terjadi.

BMKG memprakirakan, HTH lebih 16 hari diprediksi akan berlangsung pada periode Dasarian I Agustus-Dasarian I September 2024. Di mana, berdasarkan kategori BMKG, HTH 11-20 hari masuk level menengah. Sementara HTH kategori panjang jika

berlangsung 21-30 hari, sangat panjang 31-60 hari, dan lebih 60 hari kategori ekstrem panjang.

Akibat terjadinya HTH hingga memicu kekeringan, sejumlah wilayah di Indonesia kini telah menetapkan status darurat.

Ada 3 provinsi yang telah menyatakan status darurat siaga kekeringan, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi

Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, penetapan status darurat diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengajukan dukungan dari pusat.

"BNPB sudah menyampaikan ke daerah sejak dua bulan lalu agar segera melakukan apel kesiapsiagaan untuk melihat kelengkapan alat, perangkat, sumberdaya dan anggaran menghadapi musim kemarau 2024," kata Abdul Muhari, Senin (5/8/2024).

"Dengan ditetapkannya status

siaga darurat, daerah bisa mengajukan dukungan kelengkapan alat, perangkat dan sumberdaya/anggaran kepada pemerintah pusat," tambahnya.

Dia mengungkapkan, sejumlah kabupaten/ kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur kini telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Diantaranya Banyuwangi, Jombang, Blitar, Paditan, Ngawi, Pasuruan, dan Kota Batu yang siaga karhutla (kebakaran hutan dan lahan). (tro,ist/dya)

Pemkot Malang Diminta Efisienkan Belanja Pegawai DPRD: Salurkan Anggaran untuk Kegiatan Masyarakat



Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat saat menyampaikan penjelasan tentang Perubahan APBD 2024, Senin (5/8/2024). (Santi/Lenteratoday)

MALANG - DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) mengefisienkan anggaran belanja pegawai. Harapannya bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat.

Dorongan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. "Memang kami lihat dari segi posturnya belum kelihatan, tadi masih bersifat global.

Tapi Belanja modal, belanja hibah, sudah semua kami ubah agar semua bisa kita laksanakan di tahun 2024 ini," ujarnya setelah penyampaian penjelasan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2024, Senin (5/8/2024).

Made menekankan, pentingnya

optimalisasi pemanfaatan belanja APBD melalui Perubahan Anggaran ini. Menurutnya, efisiensi belanja pegawai menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini.

"Belanja pegawai sudah kami efisiensi, jika benar-benar di tahun ini Kota Malang sudah tidak ada tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masuk, ya sudah. Lebih baik anggaran Belanja Pegawai dibuat untuk Belanja Modal atau buat kegiatan masyarakat," jelasnya.

Diketahui, dalam rincian anggaran yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Wahyu, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 203 miliar 529 juta, meningkat sebesar Rp 20 miliar 975 juta dibandingkan anggaran awal sebesar Rp 182 miliar 554 juta.

Sedangkan Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp 970 miliar 444 juta, turun sebesar Rp 21 miliar 808 juta dari pagu awal sebesar Rp 992 miliar 252 juta.

Ketika disinggung mengenai alasan efisiensi Belanja Pegawai, Made

menjelaskan, efisiensi tersebut bukan disebabkan oleh PNS yang purna tugas, melainkan karena serapan anggaran yang hanya sekitar 80 persen di APBD Murni 2024.

"Karena harapan kami saat itu, Kota Malang mendapatkan slot ASN baru. Tukin juga diprediksi lambat, ternyata tidak. Sehingga daripada itu akan menjadi potensi SILPA, segera akan kami geser ke Belanja Modal untuk kegiatan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menambahkan, Perubahan APBD ini merupakan tindak lanjut dari KUPA-PPAS yang telah disepakati bersama.

Wahyu juga menekankan, pembahasan lebih lanjut mengenai Perubahan APBD 2024 ini akan dilanjutkan dalam rapat Badan anggaran (banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Guna memastikan neraca belanja APBD Kota Malang di tahun 2024 dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat. (Santi/Dya)

Minimalisir Kecelakaan di Jalur Klemuk Pemkot Batu Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu merencanakan penambahan jalur keselamatan dan penerapan satu arah di Jalur Klemuk, Kelurahan Songgokerto. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan alternatif tersebut.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Eko Setyawan, mengungkapkan proyek penambahan jalur keselamatan direncanakan dimulai pada tahun anggaran 2024.

"Kalau untuk pelaksanaan konstruksi jalur keselamatan ini dijadwalkan pada tahun 2025. Ini kan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di Jalur Klemuk yang selama ini sering mengalami kecelakaan," ujar Eko, Senin (5/8/2024).

Eko menjelaskan, jalur keselamatan yang akan dibangun akan memenuhi standar teknis yang ketat, mirip dengan standar di jalan tol. Menurutnya, jalur tersebut dirancang dengan ketinggian dan kemiringan tertentu serta menggunakan material yang dapat menyerap energi kendaraan dalam keadaan darurat.

"Material ini dirancang untuk mengurangi energi kinetik saat kendaraan mengalami kecelakaan, sehingga kendaraan bisa berhenti dengan lebih aman. Karena kan energinya hilang dan mesin mati," jelas Eko.

Untuk merealisasikan proyek ini, Eko menyampaikan, Pemkot Batu telah membentuk tim survei yang melibatkan berbagai instansi,



Jalur Klemuk Kota Batu. (Dok. Istimewa)

termasuk Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Perhutani.

"Nanti juga akan dilengkapi rest area untuk mendinginkan rem kendaraan dan memberikan tempat istirahat bagi pengemudi," tambah Eko.

Terpisah, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengungkapkan rencana lain untuk meningkatkan keselamatan di Jalur Klemuk. Menurut Aries, Pemkot Batu berencana menerapkan sistem satu arah di jalur

tersebut.

"Meskipun Jalur Klemuk bukanlah jalan utama, tingginya volume kendaraan memerlukan penyesuaian untuk memastikan keselamatan pengguna jalan," katanya.

Aries menambahkan, Jalur Klemuk akan dikembalikan fungsinya sebagai jalan alternatif dengan penerapan sistem satu arah. "Kami berharap langkah ini dapat mengurangi risiko kecelakaan dan membuat jalur ini lebih aman serta efisien," tegasnya. (Santi/Dya)



Kalau untuk pelaksanaan konstruksi jalur keselamatan ini dijadwalkan pada tahun 2025. Ini kan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di Jalur Klemuk yang selama ini sering mengalami kecelakaan,"



EKO SETYAWAN

Kabid Bina Marga Dinas PUPR
Kota Batu,



BAE SUZY

Ditawari Peran Drama Misteri Baru

AKTRIS Korea Selatan Bae Suzy diwartakan mendapat tawaran untuk berperan dalam drama misteri baru garapan Han Jae Rim, yang sebelumnya menyutradarai film "The King" dan "Emergency Declaration".

Kepada Donga.com, Management Soop selaku agensi yang menaungi Suzy pada Selasa (30/7) waktu Korea Selatan mengonfirmasi bahwa Suzy telah mendapat tawaran untuk berperan dalam drama misteri bertajuk "Delusion" dan masih meninjau tawaran tersebut.

Suzy diwartakan merupakan aktris pertama yang ditawari peran ketika drama misteri tersebut masih dalam tahap perencanaan produksi, tetapi tidak jadi menerimanya karena ada masalah jadwal.

Dia kembali ditawari untuk berperan dalam drama "Delusion" setelah penyesuaian periode produksi dilakukan.

Pejabat Showbox mengonfirmasi bahwa Suzy ditawari untuk berperan dalam drama tersebut pada tahap perencanaan dan kembali ditawari peran setelah penyesuaian jadwal produksi.

"Delusion" dibuat berdasarkan cerita Webtoon dengan berjudul sama, yang mengisahkan tentang seorang pelukis yang ditugasi melukis potret seorang perempuan misterius.

Aktris Han So Hee dan aktor Ryu Jun Yeol pada Maret diwartakan mendapat tawaran untuk berperan dalam "Delusion".

Namun, keduanya mengumumkan telah menghentikan pembicaraan untuk membintangi produksi baru setelah berita putus cinta mereka mengemuka pada bulan berikutnya.

Profil

Dunia hiburan Korea Selatan memiliki beberapa idol wanita dalam daftar top 5 tercantik, salah satunya adalah Bae Suzy. Tidak heran jika kehadirannya di dunia hiburan menjadi pusat perhatian banyak orang. Banyak orang yang mencari tahu biodata Bae Suzy.

Bae Suzy merupakan salah satu aktris bintang multi-talenta yang

berasal dari Korea Selatan. Selain menjadi aktris yang terkenal, dulunya ia adalah salah satu anggota girlband bernama Miss A yang telah bubar pada tahun 2017.

Bae Suzy aktif menjadi artis solo yang berada di bawah naungan Management Soop agensi. Agensi itu menaungi beberapa aktor populer seperti aktor Gong Yoo dan Nam JooHyuk. Adapun profil Bae Suzy selengkapnya adalah sebagai berikut.

Bae Suzy merupakan anak tengah di keluarganya dan lahir di Gwangju, Korea Selatan pada tanggal 10 Oktober 1994. Di keluarga Suzy, ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Su-bin dan seorang adik laki-laki bernama Sang-moon.

Ia bisa berbicara bahasa Korea dan Cina dan mengakui bahwa ia tidak suka makan sayur. Selain itu, Bae Suzy juga pernah mengakui bahwa pernah melakukan laminasi gigi (hanya untuk dua gigi depannya), tapi dia tidak melakukan operasi plastik apa pun.

Bae Suzy menekuni pendidikannya di School of Performing Arts Seoul dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2010, ia mencoba berbagai tantangan di industri hiburan Korea. Dengan kerja kerasnya, Bae Suzy kini menjadi salah satu selebriti Korea papan atas.

Sebelum memulai debutnya di dunia hiburan Korea Selatan, perjalanan karir Bae Suzy dimulai dengan menjadi model di situs belanja online. Di tahun 2009, Bae Suzy mengikuti audisi untuk Mnet Superstar K dan berhasil melewati babak penyisihan.

Namun, dia akhirnya tereliminasi. Bagaimanapun, akhirnya dia menarik perhatian pencari bakat dari JYP Entertainment dan segera menjadi trainee.

Pada bulan Maret 2010, ia memulai debutnya dengan Miss A setelah 1 tahun pelatihan, yang pertama kali berpromosi di Tiongkok sebagai grup trio yang terdiri dari Suzy, Fei dan Jia.

Kemudian, ketika Min bergabung dengan band, Miss A melakukan debut Korea mereka pada bulan Juli 2010 melalui JYP Entertainment. Debutnya

pun sukses besar dan Suzy menjadi salah satu anggota terkemuka grup tersebut.

Bersama Miss A, Suzy membawakan lagu seperti 'Hush', dan 'I Don't Need A Man' begitu populer di kalangan fans K-Pop. Bergitu juga lagu berjudul 'Bad Girl, Good Girl' yang kerap dibawakan ulang oleh penyanyi lain.

Pada Januari 2018, Bae Suzy sempat membicarakan mengenai bubarnya Miss A dalam konferensi pers. Hal itu sangat disayangkan bahwa grup yang sudah membesarkan namanya itu harus dibubarkan. Namun, para anggota bisa memiliki kesempatan lebih baik sebagai solois.

Selain karier musiknya, pada Oktober 2010, Suzy juga menjadi populer di berbagai acara dan acara musik: MBC Show! Inti Musik, Inkigayo, M! Hitung mundur, M! Countdown Hello Japan, Seoul Music Awards ke-21, Golden Disk Awards ke-26, dll.

Pada bulan Januari 2011, Suzy melakukan debut aktingnya di drama sekolah menengah 'Dream High' sebuah drama musikal remaja yang meningkatkan popularitasnya. Peran itu memenangkan penghargaan sebagai Aktris Pendatang Baru Terbaik di Baeksang Art Awards 2012. (Antara/Kumparan)





NEUROLINGUISTIK : BAGAIMANA GANGGUAN OTAK MEMPENGARUHI BAHASA

Neurolinguistik adalah salah satu bidang kajian interdisipliner dalam ilmu linguistik dan ilmu kedokteran yang mengkaji hubungan antara kerja otak manusia untuk memproses kegiatan berbahasa. Neurolinguistik berfokus pada upaya untuk membuat sebuah model neural program yang merupakan rekonstruksi kerja otak dalam memproses kegiatan bicara, mendengar, membaca, menulis, dan berbahasa isyarat.

Neurolinguistik menggabungkan ilmu saraf dan linguistik untuk memahami bagaimana struktur dan fungsi otak berhubungan dengan penggunaan bahasa.

Singkatnya, neurolinguistik berusaha mencari tahu bagaimana otak memproses bahasa dan apa yang terjadi jika ada gangguan pada bagian otak yang mengontrol kemampuan berbahasa. Bagaimana Otak Memproses Bahasa? Neurolinguistik berfokus pada bagaimana otak mengatur dan menggunakan bahasa. Ini melibatkan dua area utama di otak yang berhubungan dengan bahasa.

Dan saat kita berbicara, mendengarkan, atau membaca, otak kita bekerja sangat keras. Dua area utama yang terlibat adalah: Area Broca: Terletak di belahan kiri otak, khususnya di lobus frontal.

Area ini terlibat dalam produksi bahasa, termasuk kemampuan untuk merangkai kalimat secara gramatikal. Kerusakan pada area ini dapat menyebabkan afasia Broca, di mana seseorang mengalami kesulitan dalam membentuk kalimat yang benar

meskipun pemahaman bahasa mereka tetap utuh. Area Wernicke: Terletak di lobus temporal kiri, area ini bertanggung jawab untuk pemahaman bahasa.

Kerusakan di area ini dapat menyebabkan afasia Wernicke, di mana seseorang mungkin berbicara dengan lancar namun kalimatnya tidak memiliki makna yang jelas, dan mereka juga kesulitan memahami bahasa.

Gangguan Bahasa Akibat Kerusakan Otak Gangguan pada bagian otak yang mengontrol bahasa bisa menyebabkan berbagai masalah. Berikut beberapa gangguan bahasa yang umum: Afasia: Afasia Broca: Dikenal juga sebagai afasia ekspresif, kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam produksi bahasa. Penderita mungkin dapat memahami bahasa dengan baik tetapi mengalami kesulitan dalam merangkai kata-kata menjadi kalimat yang gramatikal.

Mereka mungkin berbicara dengan kalimat pendek atau frasa dan sering mengalami kesulitan dalam berbicara secara spontan. Afasia Wernicke: Penderita afasia ini berbicara dengan alur yang lancar tetapi tidak selalu membuat makna yang logis.

Mereka sering kesulitan memahami bahasa orang lain dan mungkin tidak menyadari bahwa apa yang mereka katakan tidak masuk akal. Disleksia: Ini adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis. Penderita disleksia sering mengalami

kesulitan dalam memproses dan menghubungkan suara dengan huruf, serta dalam memanipulasi fonem, yaitu unit suara terkecil dalam bahasa. Disleksia sering kali disertai dengan masalah dalam memproses informasi visual dan auditori.

Apraksia Bahasa: Gangguan ini membuat penderita sulit mengkoordinasikan otot-otot yang diperlukan untuk berbicara. Meskipun pemahaman bahasa dan kemampuan kognitif lainnya mungkin tetap baik, koordinasi motorik untuk berbicara terganggu, menyebabkan kesulitan dalam pengucapan dan artikulasi.

Agramatisme: Kondisi ini ditandai dengan kesulitan dalam menggunakan struktur tata bahasa yang benar. Penderita mungkin tidak dapat menggunakan bentuk kata yang tepat atau struktur kalimat yang kompleks, meskipun pemahaman dasar tentang bahasa tetap ada.

Metode Penelitian dalam Neurolinguistik Neurolinguistik menggunakan berbagai teknik untuk mempelajari bagaimana otak memproses bahasa: Pencitraan Otak: Teknik seperti MRI (Magnetic Resonance Imaging) dan PET (Positron Emission Tomography) digunakan untuk memvisualisasikan aktivitas otak saat seseorang berbicara, mendengarkan, atau membaca. Ini membantu peneliti melihat bagian otak mana yang terlibat dalam proses bahasa dan bagaimana kerusakan pada area tertentu mempengaruhi kemampuan bahasa. Neuropsikologi: Studi kasus

individu dengan gangguan bahasa tertentu memberikan wawasan tentang hubungan antara area otak tertentu dan fungsi bahasa. Melalui evaluasi dan terapi, peneliti dapat memahami bagaimana gangguan bahasa terjadi dan bagaimana mengatasinya.

Terapi dan Rehabilitasi

Neurolinguistik juga berperan penting dalam pengembangan terapi untuk gangguan bahasa. Terapi Bahasa: Terapi ini dirancang untuk membantu individu dengan gangguan bahasa dalam mengembangkan keterampilan berbahasa mereka.

Terapi dapat mencakup latihan untuk meningkatkan produksi bahasa, pemahaman, membaca, dan menulis. Teknologi dan Intervensi: Teknologi seperti perangkat lunak dan aplikasi untuk membantu latihan bahasa juga digunakan untuk mendukung individu dengan gangguan bahasa.

Ini dapat membantu dalam latihan kosakata, struktur kalimat, dan keterampilan berbicara lainnya. (nei, ist/dya)



CHINA KEMBANGKAN DRONE MIRIP BURUNG

SETIAP pemerintah memiliki cara tersendiri untuk mengawasi warganya, tak terkecuali China. Untuk mengawasi warganya, Negeri Tirai Bambu ini memilih memanfaatkan drone.

Selama bertahun-tahun terakhir, lebih dari 30 badan militer dan pemerintah China dilaporkan menggunakan drone yang dibuat mirip burung. Drone tersebut dirancang untuk mengawasi warga China, setidaknya di lima provinsi.

Melansir Cnet, program drone berbentuk burung itu dilaporkan menggunakan nama kode Dove dan dijalankan dengan Song Bifeng, seorang profesor di Northwestern Polytechnical University.

Uniknya, drone meniru kepekan sayap burung asli dengan menggunakan sepasang crank-rocker yang digerakkan motor listrik.

Setiap drone memiliki kamera HD, antena GPS, sistem kontrol penerbangan, dan sambungan data dengan kemampuan komunikasi satelit.

Menurut tim anggota Song Yang Wenqing, para peneliti percaya teknologi ini memiliki potensi yang baik untuk penggunaan berskala besar di masa depan.

Drone memiliki beberapa keunikan untuk memenuhi permintaan drone di sektor militer dan sipil.

Proyek robot burung mata-mata ini diberi nama sandi "Dove" atau merpati. Dan kabarnya, burung robot ini sudah digunakan lebih dari 30 institusi pemerintah dan militer China di setidaknya lima provinsi di negeri Tirai Bambu.

Salah satu wilayah yang dipantau robot Dove ini adalah wilayah otonomi



Xinjiang di wilayah barat China, yang mayoritas penduduknya adalah etnis Muslim Uyghur.

Robot ini bergerak dengan menggerakkan sayapnya dengan presisi yang nyaris sama dengan burung sungguhan.

Robot ini bahkan bisa terbang bersama dengan kelompok burung sehingga keberadaannya amat tersamar.

Demikian dikabarkan harian South China Morning Post. Namun, kelemahannya drone ini tak bisa beroperasi di wilayah yang luas.

Robot ini juga hanya bisa beroperasi selama 30 menit dengan kecepatan terbang 40 kilometer per jam.

Drone burung ini dikembangkan tim ilmuwan dari Universitas Politeknik Xian, yang dikabarkan sudah melakukan 2.000 kali uji terbang.

Salah seorang ilmuwan yang

terlibat dalam program ini mengatakan, robot ini belum banyak digunakan tetapi memiliki potensi yang amat baik.

"Skalanya masih amat kecil," kata Yang Wneqing, guru besar di Fakultas Aeronautika Universitas Politeknik Xian.

"Kami yakin teknologi ini memiliki potensi besar di masa depan. Robot ini memiliki keunikan unik untuk memenuhi kebutuhan militer dan sipil," tambah Wenqing.

Profesor Li Yachao, peneliti radar militer di Laboratorium Teknologi Pertahanan Nasional di Xian, menyebut bentuk unik drone ini membuatnya sulit dideteksi radar.

China bukanlah negara pertama yang mengem-bangkan drone mirip burung.

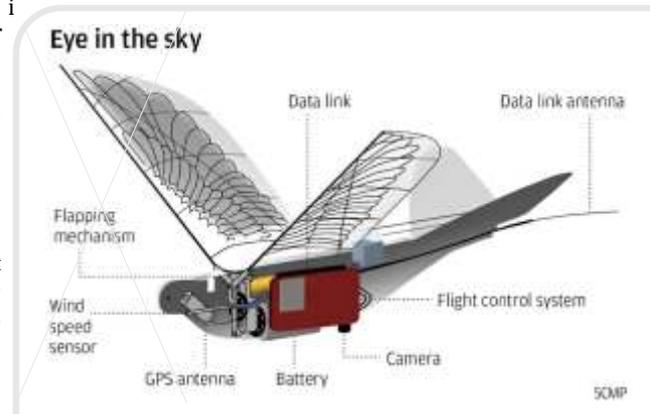
Pada 2011, perusahaan asal Jerman, Festo, mengembangkan SmartBird, drone yang terinspirasi burung camar.

SmartBird sejauh ini belum dikomersialkan seperti halnya burung bionik buatan Perancis.

Berbeda dengan robot burung buatan China, drone buatan Jerman dan Perancis ini tidak terindikasi akan digunakan untuk keperluan militer.

Sebelum drone, China juga menggunakan pengenalan wajah, kecerdasan buatan, kacamata pintar, dan teknologi lainnya untuk memantau 1,4 miliar penduduknya dengan tujuan memberikan warga skor pribadi berdasarkan mereka berperilaku. Teknologi ini memungkinkan drone tersebut untuk bergerak secara realistis sepeti burung, sehingga bisa beroperasi tanpa menimbulkan kecurigaan.

Inovasi ini juga mencerminkan tren dalam teknologi militer yang semakin canggih dan sulit dideteksi (Lenteratoday)



OE & WILSEN WILLIM HADIRKAN KOLEKSI BATIK CAP PENUH MAKNA

BATIK adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia.

Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya baik dalam desain/motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia.

Motif Batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motif adalah corak atau pola. Motif adalah suatu corak yang di bentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Ada kolaborasi baru batik baru di industri fashion Tanah Air.

OE atau yang dulu lebih dikenal dengan Oemah Etnik menggandeng desainer Wilsen Willim. Keduanya merilis koleksi bertajuk Siklus. Bagi OE dan Wilsen, Siklus jadi gambaran perpaduan antara warisan budaya Indonesia dengan modernitas.

Jika dilihat sekilas, rangkaian busananya menonjolkan ciri khas Wilsen Willim. Ini terlihat dari motif batik cap yang dihadirkan berupa pinwheel atau kincir angin.

Sejalan dengan itu, Siklus mengangkat kisah tentang perjalanan hidup yang terus berputar dan bertransformasi. Motif pinwheel melambangkan kebahagiaan di tengah kesulitan, dan mengingatkan kita bahwa tantangan hidup dapat diubah menjadi kekuatan dan keindahan.

Selain motif, seluruh busana yang dihadirkan punya model seperti

beskap, kemeja, hingga rok khas desain Wilsen Willim. Menurut Co-Founder OE Rizki Triana (Kiki), untuk urusan desain semua diserahkan pada Wilsen. "Memang pembagiannya untuk desain, model, dan motif kami serahkan ke Wilsen Willim. Kami dari OE fokus mengerjakan yang lain, seperti produksi, pemasaran, dan lainnya," jelas Kiki pada kumparan WOMAN saat ditemui di acara peluncuran koleksi Siklus beberapa waktu lalu.

Bicara soal produksi, seluruh kain batik yang digunakan pada koleksi ini 100 persen didesain oleh OE dan Wilsen Willim dengan teknik batik cap. Mereka melibatkan pengrajin binaan OE di Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam rangkaian Siklus, koleksinya berupa atasan beskap, kemeja lengan panjang dan pendek, korset, apron, celana, rok, hingga kain.

Di kesempatan ini, OE juga meluncurkan koleksi pria yang sudah banyak dinantikan. "Saya senang bisa berkolaborasi dengan OE. Visi dan misi kami sama, lalu kalau biasanya koleksi Wilsen Willim tersedia terbatas, Siklus ini diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak," pungkas Wilsen Willim.

Siklus Exhibition: Mini Exhibition and Collection Showcase. Menariknya, koleksi ini diluncurkan dengan suguhan pameran mini. Siklus Exhibition menghadirkan cerita di balik pembuatan koleksi dan makna pinwheel dari Wilsen Willim.

Terdiri dari beberapa segmen, eksibisi ini menekankan bagaimana seseorang melihat masa lalu, terutama masa kecil, dan cara menyikapinya. Wilsen Willim dan OE juga mengajak

pengunjung mengapresiasi diri dan mengambil pelajaran lewat masa-masa kurang menyenangkan yang pernah terjadi dalam hidup. Siklus Exhibition: Mini Exhibition and Collection Showcase digelar pada 27 Juli hingga 4 Agustus di OE Flagship Store di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.

Selain melihat pameran, pengunjung juga bisa langsung berbelanja koleksi Siklus di butik OE. Tapi kalau kamu tak sempat berkunjung, jangan khawatir, koleksinya juga bisa kamu dapatkan secara online selama persediaan masih ada. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp 700 ribuan. (nei,ist/dya) jauh lagi. (nei,ist/dya)



Istri Cak Imin Terseret ... (dari Hal 1)

KETUA Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dilaporkan oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Alasannya, Wakil Ketua DPR RI itu membawa istri saat bertugas sebagai Ketua Timwas Haji 2024.

"Teradu diduga mengajak istrinya, yang bernama, Rustini Murtadho dalam rombongan Timwas Haji DPR 2024. Dan diduga telah menggunakan visa penyelenggaraan haji bukan bisa jemaah haji. Hal ini tidak diperkenankan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan," demikian tertulis dalam tanda terima pengaduan organisasi yang diterima Senin (5/8/2024).

Musyanto menduga Cak Imin menggunakan fasilitas negara dengan membawa istrinya. Menurutnya ini tidak sesuai dengan kode etik dewan yang berlaku.

Saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua MKD, Nazzarudin Dek Gam, mengatakan saat ini pihaknya harus mempelajari laporan ini terlebih dahulu.

"Kami belum pelajari berkas laporannya karena saat ini sedang diperiksa di sekretariat," kata Nazzarudin saat dihubungi melalui pesan singkat.

Politikus PAN itu mengatakan, laporan ini baru akan ditindaklanjuti saat DPR memasuki masa sidang yang dimulai tanggal 16 Agustus 2024 nanti.

"Laporan tersebut baru akan dibahas setelah masuk masa sidang karena saat ini kami sedang reses," katanya.

Terpisah, Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meyakini laporan yang dilayangkan Padepokan Hukum Indonesia itu tidak akan ditindaklanjuti oleh PKB. Menurutnya, pelapor tidak memahami regulasi yang ada.

"Terkait bagaimana ketika orang misalkan melaporkan itu apa yang mesti dilaporkan. Nanti MKD akan mengkaji, belum tentu bisa dilanjutkan itu laporannya ya," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (5/8/2024).

Cucun menjelaskan keberangkatan Cak Imin bersama istrinya saat menjadi Tim Pengawas Haji DPR juga sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Ia juga mengklaim tidak ada perbedaan visa yang digunakan oleh Cak Imin dan istrinya saat berangkat haji.

"Aneh, dia enggak memahami yang dilaporkan itu kan ada regulasinya. Loh beliau pimpinan DPR baca PMK Nomor 164 tahun 2016, ada regulasinya tidak sembarang semua," jelasnya

"Visa kan visa haji, orang Makkah itu enggak mengenal visa apa atau apa, visa Haji hanya satu nama. Tidak

ada visa penyelenggara haji, visa itu namanya hanya visa haji," imbuhnya.

Ketua DPP PKB sekaligus Anggota Timwas Haji DPR RI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah membantah bahwa istri Cak Imin memanfaatkan uang negara untuk kegiatan yang bukan jadi kewajibannya.

Dia menegaskan bahwa keikutsertaan Rustini Murtadho menggunakan biaya pribadi.

"Istri Cak Imin bukan Timwas Haji. Yang bukan Timwas ya bayar sendiri," kata Luluk. Bahkan, lanjut Luluk, ada juga anggota Timwas lain yang mengajak anggota keluarga, namun menggunakan biaya pribadi.

"Bukan cuma bu Rustini. Ada banyak yang bawa ibunya, istri dan anak. dan bayar sendiri," ujar anggota Komisi VI DPR RI itu.

Sekjen PKB: Undangan PBNU Dagelan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mengungkapkan alasan dirinya tak memenuhi undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sedianya, PBNU mengundang Hasanuddin ke kantornya untuk meminta keterangan untuk mendalami masalah ketidakharmonisan antara PBNU dan PKB.

Hasanuddin menegaskan pihaknya tak terima dengan sikap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staqf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang seolah mengadu domba warga NU dengan PKB.

"Lalu tiba-tiba bikin tim mengundang saya. Kayak dagelan aja. Untuk apa? Mana mungkin saya memenuhi undangan mereka? Secara organisasi kita enggak ada urusan sama Gus Yahya dan Saiful. Kita entitas berbeda," kata Hasanuddin saat dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus.

Hasanuddin masih ingat pernyataan Gus Yahya yang menegaskan bahwa posisi PKB dalam Pemilu 2024 bukan representasi NU.

Karenanya, Hasanuddin pun heran karena setelah pemilu usai, PKB disebut telah melenceng dari ajaran NU.

"Begitu pascapemilu, PKB suaranya naik drastis, kursinya naik signifikan lebih dari 2150-an kursi semua tingkatan. Eh, dikatakan kita melenceng, bahkan rusak," cecarnya.

Hasanuddin pun mengklaim partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar saat ini masih "sehat". Hal ini tampak dari ajakan Presiden 2024 terpilih Prabowo Subianto yang mengajak PKB bergabung ke pemerintahan.

"Itu artinya kita seksi dan menarik. Kalau ada yang menuduh kita rusak, justru fakta ini menjelaskan siapa sesungguhnya yang rusak," ungkap dia.

Hasanuddin sebelumnya diminta datang ke kantor PBNU pukul 12.30 WIB, namun, ia tak kunjung datang. Rais Syuriah PBNU yang juga anggota tim panel Cholil Nafis menyayangkan ketidakhadiran Hasanuddin.

"Harusnya hadir pada tadi jam 12.30 menurut undangan kami, tetapi kami tunggu sampai jam 2.30 tadi, saya turun dari atas juga belum ada konfirmasi kedatangannya. Padahal sangat diperlukan hadirnya beliau," kata Cholil di kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Banser Siaga

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin meminta agar ratusan anggota Banser bersiaga 24 jam menjaga Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dari aksi demonstrasi. "Ya betul (bersiaga) 24 jam. Betul (untuk menjaga Kantor PBNU), pokoknya mereka siap jaga semuanya," ujarnya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Addin mengatakan, tidak hanya di Kantor PBNU, 8 juta anggota Banser di seluruh Indonesia juga diminta siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengawal PBNU.

Dia bahkan tak segan meminta agar kader Banser memukul mundur jika ada pendemo yang datang kembali ke Kantor PBNU. "Ini kita instruksikan seluruh kader di seluruh Indonesia, jadi kita minta pertama tidak ada lagi aksi di depan PBNU, apa pun itu. Kalau ada kita langsung sikat, langsung gebuk, tapi sebelumnya kita pendekatan persuasif," tutur dia.

Banser disiagakan karena GP Ansor tak ingin Kantor PBNU didemo kembali. Pantauan Kompas.com, ratusan anggota Banser berseragam lengkap memenuhi halaman Kantor PBNU. Pengumpulan anggota Banser ini buntut dari aksi demonstrasi di depan Kantor PBNU pada Jumat (2/8/2024).

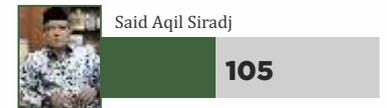
Saat itu, sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur menggelar demonstrasi di depan Gedung PBNU. Demo ini ditengarai merupakan bagian dari konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan PBNU.

Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024. Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus. Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staqf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebab, pansus tersebut dinilai mengincar Kementerian Agama yang sedang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU. (tro,ist,ant,rls/dya)

PEROLEHA SUARA KETUA UMUM PBNU

MUKTAMAR KE-30 NU

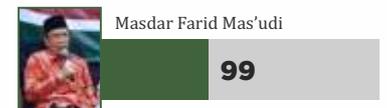
(Periode 1999-2004)



Suara

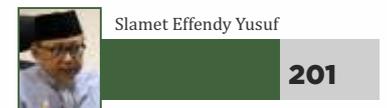
MUKTAMAR KE-31 NU

(Periode 2004-2009)



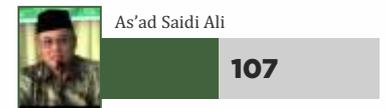
MUKTAMAR KE-32 NU

(Periode 2010-2015)



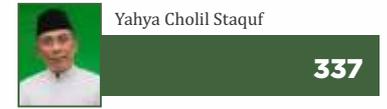
MUKTAMAR KE-33 NU

(Periode 2015-2020)



MUKTAMAR KE-34 NU

(Periode 2021-2026)



10 Jaksa Senior Ditarik Kejagung KPK Bantah Terkait Korupsi LPEI

JAKARTA- Kejaksaan Agung menarik para jaksa senior yang bertugas di KPK. Total, ada 10 orang jaksa senior yang dipulangkan ke Kejaksaan. Komisi anti-rasuah bantah ada hubungan dengan penanganan perkara korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan, mereka kembali ke institusi asalnya karena tugasnya dianggap sudah cukup, baik oleh KPK maupun Kejaksaan.

"Yang pertama saya belum mendapat informasi siapa saja jaksa-jaksa yang masa baktinya sudah selesai atau lebih dari 10 tahun, tetapi tentunya tugas mereka di sini sudah dianggap cukup baik oleh KPK maupun Kejaksaan," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (5/8/2024).

Tessa menekankan bahwa penarikan itu tidak ada keterkaitan dengan perkara yang tengah ditangani oleh lembaga antirasuah itu.

"Tidak ada kaitan selesainya masa tugas 10 jaksa tersebut dengan perkara yang ditangani. Itu secara prinsip hanya penyegaran di lembaga kejaksaan biar ada regenerasi, jaksa-jaksa di bawahnya bisa bertugas," katanya.

"Mungkin kalau yang ditarik Kasatgas, jaksa yang di bawahnya akan menggantikan sebagai Kasatgas," beber dia.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pemulangan para jaksa itu tidak memiliki hubungan dengan penanganan perkara korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Nggak ada hubungannya dengan LPEI," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi, Senin (5/8/2024).

Kasus korupsi di LPEI saat ini memang diusut oleh Kejagung dan KPK. Dalam penanganan di KPK telah ada tujuh orang yang diumumkan sebagai tersangka.

Alex menjelaskan pemulangan 10 jaksa ke Kejagung itu proses yang normal. Dia menyebut peristiwa seperti itu bukan kali pertama terjadi di KPK.

"Koordinasi antara KPK dan Kejagung agar jaksa-jaksa yang sudah lama di KPK mendapatkan pembinaan lebih lanjut di kejaksaan," ujar Alex.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar pun membenarkan bahwa 10 jaksa telah ditarik dari KPK. Pemulangan itu lantaran para jaksa tersebut telah mengabdikan sekitar 10 hingga 12 tahun di lembaga antirasuah.

"Benar ada 10 Jaksa yang diminta kembali ke Kejaksaan, tetapi tidak mendadak dan memang itu sudah masuk program penyegaran karena



Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejagung Harli Siregar.
(Dok. Puspenkum Kejagung)

mereka sudah bertugas rata-rata 10-12 tahun di KPK," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2024).

Ia juga membantah penarikan itu berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani para jaksa tersebut di KPK.

"Tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara," sambung dia.

Harli menerangkan, bahwa nantinya pengganti 10 jaksa tersebut juga akan ditugaskan ke KPK.

"Ya, mekanisme itu akan dilakukan seperti sebelum-sebelumnya, ada yang diminta kembali kemudian ada yang ditugaskan sebagai pengantinya," pungkasnya.

Novel Perbarui Gugatan

Di sisi lain, Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, melakukan perbaikan petitum terkait permohonan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Novel mengatakan perbaikan itu diharapkan dapat memperluas pihak-pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Hal itu disampaikan Novel dalam sidang perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024, di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Dalam petitum terbarunya, Novel meminta syarat calon pimpinan KPK berusia 50 tahun atau memiliki pengalaman menjalankan tugas-tugas pokok KPK selama satu periode jabatan. Usia maksimal adalah 65 tahun.

"Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK,

yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode masa jabatan pimpinan KPK, atau paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun," bunyi petitum terbaru.

Sedangkan, dalam petitum yang lama, Novel meminta syarat calon pimpinan KPK adalah berusia 50 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pimpinan KPK. Kemudian, berusia 40 tahun dan berpengalaman sebagai pegawai KPK selama satu periode.

"Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun," bunyi petitum lama.

Novel menjelaskan, dalam perubahan petitum itu, pihaknya tidak lagi menitikberatkan syarat usia 40 tahun. Namun, dia menyampaikan fokusnya saat ini ialah adanya perluasan dari pandangan terhadap pihak-pihak yang memiliki pengalaman dalam tugas pokok di KPK.

"Yaitu pencegahan maupun pemberantasan dalam hal ini tindak pidana korupsi," ujarnya.

Novel menilai dalam putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Wakil Pimpinan KPK Nurul Ghufron hanya dapat dijalankan untuk satu pihak saja. Sedangkan, kata dia, perlu adanya perluasan syarat agar pihak lain pun dapat mendaftar sebagai pimpinan KPK.

JEJAK REBUTAN KASUS KORUPSI LPEI



10 Mei 2023

KPK menerima laporan tentang dugaan korupsi pembiayaan ekspor di LPEI



13 Februari 2024

Laporan tentang korupsi pembiayaan ekspor LPEI diserahkan kepada Direktorat Penyelidikan KPK. Pada hari yang sama tim penyelidik memulai proses penyelidikan kasus.



18 MARET 2024

di Kejaksaan Agung

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan kasus LPEI



18 MARET 2024

di KPK

Sejumlah pegawai menemui pimpinan KPK untuk mengingatkan soal perkara korupsi LPEI



19 MARET 2024

KPK melakukan gelar perkara kasus LPEI. Hasilnya, pimpinan KPK menyetujui dinaikannya status kasus penyelidikan menjadi penyidikan.

Diketahui, MK mengabulkan gugatan Nurul Ghufron tentang syarat usia calon pimpinan KPK. Dalam putusannya, calon pimpinan KPK harus berusia 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan.

"Karena banyak usia produktif walaupun belum 50, tapi punya banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat diperlukan untuk bisa bantu KPK," ujar Novel.

"Karena tentunya bukan hanya terkait dengan kompetensi maupun pengalaman saja, tapi juga keberanian dan banyak lagi. Dan itu rasanya kita berharap ke depan semakin banyak lagi orang bisa berkontribusi untuk maju sebagai capim KPK," imbuh dia. (tro,ist,ant/dya)